

**TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR
MINUM DALAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA DAN
SERTIFIKAT LAIK SEHAT**

Mardia Ibrahim, Iyam Irahahmi Kaharu, Shafira Alwi

ABSTRAK

Shafira Alwi (0101 1711 042), dengan judul “Tinjauan Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dalam Penerbitan Surat Izin Usaha dan Sertifikat Laik Sehat”. Di bawah Bimbingan Ibu Mardiah Ibrahim, selaku pembimbing I dan Ibu Iyam Irahahmi Kaharu, selaku pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perizinan dalam menetapkan izin pelaku usaha depot air minum isi ulang serta untuk mengetahui Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki Izin.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, dengan menggunakan jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Hukum Empiris yang di dukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di 5 depot yang ada di Kota Ternate yang dijadikan sampel oleh penulis, masih terdapat 2 Depot yang belum memiliki surat izin Usaha dan 3 depot yang belum memiliki sertifikat laik higiene, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan izin Depot Air Minum di Kota Ternate belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu semakin banyaknya pengusaha depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal ini tentu dapat merugikan Masyarakat dirugikan dalam bentuk keamanan kesehatan. Dengan tidak adanya izin, air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat tentu tidak terjamin kualitas kebersihannya dan keamanannya. Selain itu pemerintah daerah juga dirugikan dengan tidak adanya biaya retribusi daerah, karena banyaknya depot air minum yang beroperasi namun tidak mengurus izinnya ke pihak-pihak berwenang.

ABSTRACT

Shafira Alwi (0101 1711 042), with the title "Review of the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2014 concerning Sanitary Hygiene of Drinking Water Depots in Issuing Business Permits and Health Eligibility Certificates". Under the guidance of Mrs. Mardiah Ibrahim, as supervisor I and Mrs. Iyam Irahlatmi Kaharu, as supervisor II.

The purpose of this study was to determine the licensing procedure in determining the license for refill drinking water depot business actors and to find out the legal implications for refill drinking water business actors who do not have a license.

This research is located at the Ternate City Health Office, Ternate City Investment and One Stop Integrated Services Office, Ternate City Industry and Trade Office, using the type of research in writing this law is empirical legal research supported by field research. The types of data used are primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through the interview process and literature study. Data analysis used is by means of qualitative descriptive analysis.

Based on the results of research in 5 depots in Ternate City which were sampled by the author, there are still 2 depots that do not yet have a business license and 3 depots that do not yet have a hygiene-worthy certificate, so it can be concluded that the implementation of a Drinking Water Depot permit in Ternate City has not operate in accordance with applicable regulations. In addition, the increasing number of refill drinking water depot entrepreneurs who do not have permits in accordance with the regulations set by the government, this can certainly harm the community in the form of health security. In the absence of a permit, the drinking water consumed by the community is certainly not guaranteed for its cleanliness and safety. In addition, local governments are also disadvantaged by the absence of regional retribution fees, because many drinking water depots operate but do not take care of their permits to the authorities.